**TRANSPARANSI AKUNTANSI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PADA DIREKTORAT KEUANGAN TNI AD PADA KODAM III/SILIWANGI**

**Syifa Vidya Sofwan**

**e-mail : vidyasofwan@yahoo.com**

**Neng Dewia Cahaya**

**e-mail : [dewiacahayakurnia@gmail.com](mailto:dewiacahayakurnia@gmail.com)**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang transparansi akuntansi dalam penggunaan anggaran pada Direktorat Keuangan TNI AD pada Kodam III/Siliwangi bertujuan untuk meninjau tingkat transparansi akuntansi dalam penggunaan anggaran oleh Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat pada Kodam III/Siliwangi. Transparansi akuntansi menjadi aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, bahkan dalam lingkungan militer yang memiliki keterbatasan akses informasi publik karena alasan keamanan.

Penting nya mengapa transparansi keuangan sangat dibutuhkan karna hal ini dapat mecegah terjadi nya korupsi dan penyelewengan dana. Tata Kelola uang yang transparan juga seringkali terjadi di lingkungan militer dimana transparansi ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan negara.

**Kata Kunci :Transparansi Akuntansi, Penggunaan Anggaran**

1. **PENDAHULUAN**

Penggunaan anggaran keuangan di Instansi Pemerintahan memiliki permasalahan yang cukup kompleks dan seringkali menjadi sorotan publik. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain adalah korupsi, penyelewengan dana, dan tata Kelola uang yang kurang transparan. Salah satu nya Instansi Pemerintahan di bidang Militer dimana Korupsi dapat merugikan negara secara finansial. Korupsi ini bisa terjadi dimulai dari penerimaan suap, *mark up* harga dari penerimaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Penyelewengan dana merupakan beban yang cukup berat bagi negara karena dapat menimbulkan kerugian besar, penyelewangan dana itu sendiri bisa berupa penggunaan data untuk kepentingan pribadi, pemborosan dalam pengeluaran, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Transparansi Akuntansi dalam penggunaan Anggaran Terhadap Direktorat Keuangan TNI AD pada Kodam III/Siliwangi.
2. Apa Saja Faktor-Faktor yang Menyebabkan kurangnya Transparansi dalam Penggunaan Anggaran Direktorat Keuangan TNI AD.
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi Kendala Transparansi Akuntansi Penggunaan Anggaran.
   1. **Tujuan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Transparansi Akuntansi dalam penggunaan Anggaran Terhadap Direktorat Keuangan TNI AD pada Kodam III/Siliwangi.
2. Faktor penyebab kurang nya Transparansi dalam Penggunaan Anggaran Direktorat Keuangan TNI AD.
3. Upaya untuk mengatasi Kendala Transparansi Akuntansi Penggunaan Anggaran.

**II.TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

**2.2 Pengertian Akuntansi**

Menurut Profesor Kieso, Weygandt, dan Warfield**,** Dalam buku berjudul “*Intermediate Accounting*” yang ditulis oleh Profesor Kieso, Weygandt, dan Warfield, dijelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan.

**2.3 Pengertian Penggunaan Anggaran**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan pada Pasal I menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementrian negara/lembaga.

1. **METODE PENELITIAN**
   1. **Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

* 1. **Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

**IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Analisis**

Transparansi akuntansi dalam penggunaan anggaran pada Direktorat Keuangan Kodam III/Siliwangi telah dilakukan sesuai dengan pedoman internal dan peraturan keuangan negara. Meskipun keterbukaan informasi kepada publik dibatasi, proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis dan diawasi ketat. Upaya peningkatan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di masa mendatang.

**4.2 Pembahasan**

**4.2. Transparansi Akuntansi Penggunaan Anggaran**

Transparansi akuntansi penggunaan anggaran di Kudam III/SLW dapat dilihat melalui tahapan-tahapan, yaitu :

1. Laporan Keuangan Dari Beberapa Satker

Tahap pertama adalah Satuan Kerja atau satker membuat Laporan Keuangan berdasarkan penggunaan anggaran yang telah di anggarkan berdasarkan Monitoring Sistem Aplikasi Sistem Akuntansi. Kemudian Laporan Keuangan tersebut diberikan ke Kabag Akuntansi Kudam.

1. Mereview Laporan Keuangan

Kemudian Laporan Keuangan dari beberapa satker di *review* oleh Kabag Akuntansi apabila terjadi ketidak samaan maka pihak Kabag Akuntansi memberikan surat Nota Hasil Pemeriksaan Laporan (NHPL) setelah itu satker memberikan Jawaban Hasil Pemeriksaan Laporan (JHPL) agar Laporan Keuangan dinyatakan Valid. Kemudian Kabag Akuntansi membuat hasil Laporan dari beberapa satker menjadi Laporan Keuangan tingkat Kodam dan di berikan ke Subdik Akuntansi.

1. Mengaudit Laporan Keuangan

Setelah Laporan Keuangan diberikan ke Subdik Akuntansi untuk di *review* dan di Audit. Audit Laporan Keuangan ini dilakukan per Triwulan, Semester, dan Tahunan. Kemudian Subdik Akuntansi menjadikan Laporan Keuangan tingkat TNI AD lalu di berikan ke Kemhan. Setelah itu BPK mengaudit hasil Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Kemhan. Apabila ada kekeliruan saat mengaudit maka pembuat Laporan Keuangan wajib mempertanggung jawabkan hasil Laporan Keuangan tersebut.

Transparansi Akuntansi Penggunaan Anggaran di Kudam III/SLW berjalan dengan baik setiap tahunnya. Namun ada saja faktor yang menyebabkan terkendala nya pembuatan Laporan Keuangan tersebut.

**4.2.2 Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terkendalanya Transparansi Akuntansi Penggunaan Anggaran**

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan melalui wawancara dan dokumentasi, pada pembuatan Laporan Keuangan tingkat wilayah Kodam terdapat faktor yang menyebabkan terkendalanya Transparansi Akuntansi Penggunaan Anggaran yaitu kurang lengkap dan tidak sesuai hasil laporan Monsakti dengan hasil Laporan Keuangan tingkat satker sehingga hal itu akan menghambat proses pengauditan.

**V.SIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Transparansi Akuntansi dalam Penggunaan Anggaran terhadap Direktorat Keuangan TNI AD pada Kodam III/Siliwangi, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

* 1. Transparansi Akuntansi Pengguanaan Anggaran di Kudam III/SLW telah dilakukan berdasarkan akuntabel, tertib sesuai aturan dan pedoman.
  2. Yang menjadi kendala dalam Transparansi Akuntansi Penggunaan Anggaran di Kudam III/SLW adalah kurang lengkap dan ketidak sesuaian hasil laporan keuangan Monsakti dengan hasil Laporan Keuangan tingkat satker.

**5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Keuangan Kodam III/Siliwangi disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pengelolaan anggaran melalui pelatihan rutin dan sertifikasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital, guna memastikan proses pencatatan dan pelaporan anggaran berjalan lebih efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung perlu menunjuk Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang khusus bertugas menangani pengelolaan arsip. SDM yang terlatih akan memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik, mulai dari penyusunan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip, sehingga proses pengelolaan arsip menjadi lebih terorganisir dan efektif.
2. Diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan internal secara berkelanjutan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai prosedur dan bebas dari penyimpangan. Selain itu, transparansi dalam lingkup internal harus diperluas dengan menyediakan laporan keuangan yang ringkas namun informatif kepada unit-unit terkait. Apabila memungkinkan, penyusunan laporan ringkasan untuk publik juga dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan militer, dengan tetap mempertimbangkan aspek kerahasiaan institusi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Mardiasmo.2004.Tentang Perwujudan Transparansi dan Akuntanbilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik.Andi,Yogyakarta.Hal.30

Sabarno, Hari. (2007). Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Penerbit Grasindo,Hal 38.

Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Warfield, Terry D.. (2016). *Intermediate Accounting* (16th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Meigs, Earl K., & Meigs, James M.. (1995). *Accounting: The Basis for Business Decisions* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.

**Perundang – undangan :**

Peraturan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tugas Keuangan Komando Daerah Militer (ORGAS KUDAM).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara.

**Website :**

Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat, <https://ditkuad.mil.id/profiles/index/pftt>

KOMPAS.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/09/20315071/data-belanja-alutsista-disebut-bukan-rahasia-karena-pembeliannya-juga>, (diakses pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 20.31 WIB)

Berita Transparansi, <https://beritatransparansi.co.id/transparansi-menurut-para-ahli/>, (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2016)